

**DETERMINAN BELANJA MODAL
PADA PEMERINTAH PROVINSI DI SUMATERA**

Madry¹, Maria², Nurhasanah³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

madry.789@gmail.com*

Abstract

This research aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD), Special Allocation Fund (DAK), regional wealth, and tax effort on capital expenditure in provincial governments in Sumatra. In this research, researchers use quantitative research types, with document data collection techniques sourced from secondary data obtained from the Audit Result Report (LHP) LKPD BPK RI. This research uses a saturated sampling method with a population of 10 Provincial Governments in Sumatra for 5 years from 2018 to 2022, with 50 observation units. Data analysis techniques and multiple linear regression assisted by SPSS version 26. The results of the analysis show that both partially and simultaneously PAD, DAK, regional wealth and tax effort have a positive and significant effect on capital expenditure by 61.9%.

Keywords: Regional Original Income, Special Allocation Funds, Regional Wealth, Tax Effort, Capital Expenditures

Abstrak

Riset ini ditujukan guna mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), kekayaan daerah, dan tax effort terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di sumatera. Pada riset ini, periset menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data dokumen yang bersumber dari data sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD BPK RI. Riset ini memanfaatkan metode sampling jenuh dengan populasinya 10 Pemerintah Provinsi di Sumatera selama 5 tahun dari tahun 2018 s.d 2022, dengan unit pengamatan sebanyak 50. Teknik analisis data dan regresi linier berganda berbantuan SPSS versi 26. Hasil analisis menunjukkan baik secara parsial ataupun simultan PAD, DAK, kekayaan daerah serta *tax effort* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal sebesar 61,9%.

Kata Kunci: PAD, DAK, Kekayaan Daerah, Tax Effort, Belanja Modal

Diterima Redaksi :05-05-2025 | Selesai Revisi : 29-06-2025 | Diterbitkan Online : 30-06-2025

1. Pendahuluan

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia telah mengalihkan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya terpusat menjadi terdesentralisasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pemerintahan mengalami perubahan tersebut. Tuntutan bagi pemerintah daerah guna menjalankan tugas beserta tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang ditetapkan dan ketentuan terkait dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No. 33 Tahun 2004. Program otonomi daerah yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia dinilai sangat demokratis dan menganut cita-cita desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah komponen

pelimpahan kewenangan yang menunjukkan bahwasanya kewenangan yang pemerintah daerah miliki ialah guna mengatur serta mengawasi berbagai masalah daerah, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan yang signifikan, sehingga kebijakan otonomi daerah memberi pemerintah daerah wewenang guna menetapkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan serta keadaan lokal.

Pemerintah daerah memperoleh kewenangan guna secara mandiri mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk mengoptimalkan potensi keuangan daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan adanya otonomi daerah. APBD ini dipakai guna pelbagai jenis pembelanjaan daerah, mulai belanja modal ataupun rutin sampai dengan belanja tak terduga.

Pemda harus memprioritaskan manajemen belanja daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dioptimalkan secara efektif (Raharja dkk., 2017). Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui belanja modal, yaitu pengeluaran dari APBD untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana daerah. (Lamido dkk., 2018).

Karena belanja daerah terkait dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan amenities, maka belanja modal yang mencakup keduanya perlu diperhatikan. Untuk mendorong pembangunan daerah, pemerintah harus melakukan alokasi belanja modal secara efektif dan efisien. Tingkat kesesuaian antara realisasi belanja modal dengan penyerapan anggaran dapat digunakan untuk menilai kinerja pembangunan daerah. Diharapkan dengan optimalisasi penyerapan belanja modal dapat dilakukan peningkatan dan peningkatan perolehan aset tetap dengan masa manfaat minimal satu tahun.

Anggaran yang pengeluarannya ditujukan guna pendapatan aset tetap ataupun aset lainnya yang selama beberapa periode akuntansi memberi beberapa manfaat disebut sebagai belanja modal. Berbagai aset yang memiliki nilai manfaat jangka panjang, seperti tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan struktur, jalan, sistem irigasi, serta aset lainnya, merupakan sasaran belanja modal. Hal ini sesuai dengan LHP BPK RI. Secara umum, penggunaan belanja modal ditujukan guna memajukan serta meningkatkan sektor transportasi, kesehatan, hingga pendidikan, yang semuanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (Simanjuntak & Ginting, 2019). Perihal tersebut dikarenakan belanja modal menjadi salah satunya upaya utama pemda dalam mendukung pelayanan publik, maka anggaran tersebut harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan cara yang dapat diterima. (Hamid & Yusuf, 2023).

Pemerintah daerah membiayai pengeluaran belanja modal melalui beragam sumber dana. Salah satunya sumber pendanaan yang dimanfaatkan ialah PAD, yang meliputi pendapatan dari retribusi dan sumber daya alam setempat. Perbedaan signifikan dalam PAD antar daerah telah tercatat dalam data dan fakta terkait (Lamido dkk., 2018). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pemerataan finansial lewat Transfer ke Daerah, Dana ini termasuk dalam Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil. (Budiriananti dkk., 2021). APBN merupakan sumber dana itu. Pemerintah pusat berharap supaya tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa pemerintah daerah sisihkan sebagai sumber pendanaan proyek-proyek modal dengan bantuan dana ini. (Lutpikah dkk., 2020).

Selama periode 2018 hingga 2022, analisis terhadap persentase belanja modal pada 10 Provinsi di Sumatera

mengungkapkan dinamika yang mencerminkan beragam prioritas pembangunan dan strategi keuangan pemerintah daerah. Dari Aceh hingga Kepulauan Riau, terlihat kecenderungan peningkatan atau penurunan alokasi dana belanja modal, yang mencerminkan respons pemerintah provinsi terhadap berbagai tantangan dan peluang pembangunan di tingkat regional. Informasi realisasi belanja modal 10 Provinsi di Sumatera periode tahun 2018 – 2022 tersaji dalam table berikut:

Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun Anggaran 2018 – 2022

	2018	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata
Aceh	75.85	86.16	83.81	66.34	89.24	80.28
Sumut	82.34	79.22	80.48	86.67	74.61	80.664
Sumbar	89.56	84.99	86.67	79.70	89.41	86.066
Riau	57.97	77.98	86.15	81.51	83.06	77.334
Jambi	78.08	90.02	102.00	92.66	92.97	91.146
Sumsel	90.93	88.25	72.36	83.82	94.19	85.91
Bengkulu	81.64	83.07	97.32	76.85	95.60	86.896
Lampung	84.12	88.81	89.10	91.91	90.26	88.84
Kep. Babel	91.38	90.31	95.37	74.55	79.96	86.314
Kep. Riau	92.52	93.81	97.42	89.63	95.06	93.688
Rata - Rata	82.43	86.262	89.068	82.364	88.436	85.7138

Sumber : Data diolah, BPK RI, 2024

Berdasarkan tabel 1 rata-rata realisasi belanja modal dalam lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan realisasi yang beragam untuk setiap provinsi. Secara keseluruhan rata-rata realisasi belanja modal di setiap provinsi cukup baik. Hanya saja ada beberapa provinsi yang benar-benar mengoptimalkan belanja modalnya dan ada yang masih kurang optimal. Rata-rata belanja modal dalam lima tahun terakhir yang paling tertinggi realisasinya yaitu di Provinsi Kepulauan Riau yang mana mencapai 93% dari pagu yang dianggarkan. Berbanding terbalik dengan realisasi belanja modal pada provinsi Riau rata – rata 77% dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 penyerapan realisasi belanja modal untuk provinsi Riau hanya sebesar 57,97% dari pagu yang dianggarkan sehingga persentase yang tidak terealisasi adalah sebesar 42,03% PAD Provinsi Riau pada tahun 2018 cukup besar realisasinya yaitu 91,80%.

Sesuai klausul yang tercantum pada Permendagri bernomor 27 Tahun 2021 mengenai Pedoman Penyusunan APBD, disarankan agar kebijakan alokasi belanja modal mencapai minimal 40% dari total belanja daerah. pemerintah menyarankan agar belanja modal mencapai 40% dari total belanja daerah hal ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh beberapa tujuan strategis yaitu 1). Untuk mempercepat pembangunan infrasturkur di daerah, 2). Meningkatkan daya saing daerah, 3). Meningkatkan kemandirian daerah dan 4). Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Namun, dalam praktiknya, Pemerintah Provinsi di Sumatera tidak mengalokasikan anggaran sebesar 40% untuk belanja modal, seperti yang terungkap dari data yang tersaji dalam Tabel 2:

Berdasarkan tabel 2 analisis terhadap data belanja daerah Pemerintah Provinsi di Sumatera pada tahun 2021, Diketahui bahwa masih sangat kecilnya alokasi anggaran belanja modal masing-masing pemerintah

Tabel 2. Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Sumatera Tahun Anggaran 2021

	Belanja Modal (triliun)	Total Belanja Daerah (triliun)	Alokasi Belanja Modal (%)
Aceh	3,31	13,52	24,48%
Sumut	1,31	13,95	9,29%
Sumbar	0,83	6,89	12,04%
Riau	1,24	7,74	16,02%
Jambi	0,48	3,99	12,03%
Sumsel	2,19	11,41	19,19%
Bengkulu	0,42	3,05	13,77%
Lampung	0,92	6,30	14,60%
Kep. Babel	0,57	2,46	23,17%
Kep. Riau	0,37	3,91	9,46%

Sumber : Olahan data, BPK RI, 2024

daerah apabila dibanding total belanja daerah. Di Sumatera, alokasi belanja modal rata-rata pemerintah provinsi adalah 15,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera belum mencapai target alokasi anggaran belanja modal sebesar 40%. sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi belanja modal pada pemerintah provinsi ini masih di bawah target yang ditetapkan, terutama di provinsi-provinsi seperti yang memiliki alokasi belanja modal masing-masing sebesar 9,29% untuk provinsi Sumatera utara, Kepulauan Riau sebesar 9,46%, Jambi sebesar 12,03%, Sumatera Barat sebesar 12,04%, Bengkulu sebesar 13,77%, Lampung sebesar 14,60%, Riau sebesar 16,62%, dan Sumatera Selatan sebesar 19,19%. Rendahnya alokasi anggaran untuk belanja modal serta perbedaan signifikan dalam alokasi belanja modal tersebut mengindikasikan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan lokal dan kemakmuran ekonomi di wilayah tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian beberapa aspek yang terkait dengan fenomena pelbagai faktor yang memengaruhi belanja modal, yaitu: PAD, DAK, Kekayaan Daerah, serta *Tax Effort*. Berdasar penelitian yang ada, peneliti mengambil objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi, peneliti juga mengambil beberapa unsur yang belum banyak diteliti dan diuji pada penelitian sebelumnya yaitu kekayaan daerah dan *tax*

effort terhadap belanja modal. Peneliti mengambil data dari 10 LHP LKPD Provinsi di Sumatera dari tahun 2018-2022. Peneliti tertarik melakukan kajian dengan judul tersebut karena banyaknya kejadian dan perbedaan pada kajian sebelumnya. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Kekayaan Daerah dan *Tax Effort* Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Sumatera”.

2. Metode Penelitian

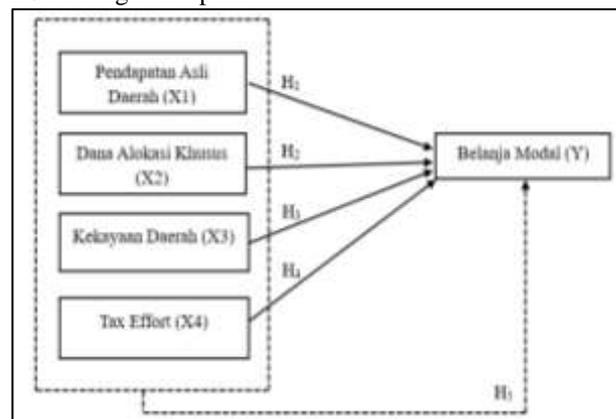
2.1. Metode dan Sumber Data Penelitian

Pengumpulan data sekunder dipakai oleh periset dalam riset ini. Metode pengumpulan data pada riset ini menggunakan strategi dokumentasi. Periset menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Provinsi di Sumatera lewat laman resmi BPS RI tahun 2018–2022 dan LHP Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Sumatera dari situs resmi BPK RI. Dengan menggunakan teknik sampling jenuh, maka seluruh anggota populasinya dipakai sebagai sampel pada riset ini. Sedang sampel jenuh yang dipakai dalam pendekatan sampling ialah 10 Provinsi di Sumatera dengan total unit pengamatan 50 menggunakan LHP LKPD selama 5 tahun (2018 sampai dengan 2022).

2.2. Teknik Analisis Data

Sugiyono, (2023:206), menafsirkan analisis data sebagai langkah yang dijalankan pasca pengumpulan data dari keseluruhan responden ataupun sumber lain pada penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26, berbagai pendekatan regresi linier dipakai pada riset ini. Uji statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji asumsi klasik, uji t, serta uji f digunakan untuk menguji data yang diperoleh.

2.3. Kerangka Berpikir



Sumber: Peneliti, 2024

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ : Pengaruh Parsial
- - - - -▶ : Pengaruh Simultan

Hipotesis riset ini yang diajukan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

- H₁ : PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- H₂ : DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- H₃ : Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- H₄ : *Tax Effort* berpengaruh terhadap Belanja Modal.
- H₅ : PAD, DAK, Kekayaan Daerah, dan *Tax Effort* berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				Std. Deviation
	N	Minimum	Maximum	Mean	
Belanja Modal	50	26.48	28.78	27.5232	.61143
Pendapatan Asli Daerah	50	27.25	29.61	28.4322	.63241
Dana Alokasi Khusus	50	25.43	29.11	27.5724	.90565
Kekayaan Daerah	50	29.08	31.19	30.1754	.69009
Tax Effort	50	13.86	1030.11	130.0276	209.71158
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2024

Gambaran umum analisis deskriptif variabel dependen belanja modal diberikan dalam Tabel 4. Temuan analisis deskriptif tersebut terlihat dari skor minimum sejumlah 26,48. untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018. Belanja modal pemerintah provinsi yang memperoleh skor *maximum* sejumlah 28.78 jatuh pada Provinsi Aceh untuk tahun anggaran 2019. Kemudian skor rerata belanja modal sejumlah 27.5232 dengan standar deviasi sejumlah 0,61143 dan jumlah sampel sejumlah 50.

Analisis deskriptif pada variabel independen yaitu PAD, menunjukkan skor *minimum* sejumlah 27.35 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2020. PAD pemerintah provinsi yang memperoleh skor *maximum* sejumlah 29.61 jatuh pada Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2022. Kemudian skor rerata PAD sejumlah 28.4322 dengan standar deviasi sejumlah 0,63241 dan jumlah sampel sejumlah 50.

Analisis deskriptif pada variabel independen yaitu DAK, dapat dilihat dari skor *minimum* sejumlah 25.43 untuk Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2018. DAK pemerintah provinsi yang memperoleh skor *maximum* sejumlah 29.11 jatuh pada Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2020. Kemudian skor rerata DAK sejumlah 27.5724 dengan standar deviasi sejumlah 0,90565 dan jumlah sampel sebanyak 50. Selanjutnya analisis deskriptif variabel independen yaitu kekayaan daerah dengan skor *minimum* sejumlah

29.08 untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018. Kekayaan daerah pemerintah provinsi yang memperoleh skor *maximum* sejumlah 31.19 jatuh pada Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2022. Kemudian skor rerata kekayaan daerah sejumlah 30.1754 dengan standar deviasi sejumlah 0,69009 dan jumlah sampel sejumlah 50.

Analisis deskriptif pada variabel independen yaitu *tax effort* dengan skor *minimum* sejumlah 13.86 untuk Provinsi Jambi pada tahun 2018. *Tax effort* pemerintah provinsi yang memperoleh skor *maximum* sejumlah 1030.11 jatuh pada Provinsi kepulauan bangka belitung untuk tahun 2022. Kemudian skor rerata *tax effort* sejumlah 130.0276 dengan standar deviasi sejumlah 209.7158 dan jumlah sampel sejumlah 50.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47692452
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.066
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2024

Uji kenormalan dikenal sebagai Asymp berdasar tabel 5 tersebut, yang menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel. Menurut skor Sig (2-tailed), 0,200 lebih tinggi daripada 0,05. Hasil yang signifikan secara statistik di atas 0,05 menunjukkan distribusi data yang normal. Model regresi dengan nilai residual yang terdistribusi secara teratur dianggap baik. Dimungkinkan untuk menyimpulkan bahwa residual dalam contoh ini terdistribusi secara teratur.

3.2.2 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.738	.464
	PAD	.067	.947
	DAK	-1.472	.148
	Kekayaan Daerah	1.119	.269
	Tax Effort	.745	.460

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil *Output* SPSS 26, 2024

Berdasar tabel 6 hasil uji heterokedastisitas memperlihatkan nilai signifikansi (Sig.) dari keempat variabel yang tersusun atas PAD (X₁), DAK (X₂), kekayaan daerah (X₃) dan *tax effort* (X₄) probabilitas signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Bisa ditarik simpulan bahwasanya tak terdapat gejala heteroskedastisitas.

3.2.3 Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.297	3.361
	DAK	.719	1.392
	Kekayaan Daerah	.257	3.891
	Tax Effort	.868	1.152

a. Dependent Variable: Belanja Modal
 Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

Tak ada variabel bebas yang memiliki skor toleransi kurang daripada 0,10, seperti yang diilustrasikan pada Tabel 7. Berdasar penghitungan VIF turut memperlihatkan ihwal ini, khususnya tak adanya variabel bebas yang mempunyai skor VIF lebih tinggi daripada 10. Variabel bebas PAD (0,297), DAK (0,719), kekayaan daerah (0,257), dan *tax effort* (0,868) memiliki nilai toleransi. Sementara itu, variabel bebas PAD (3,361), DAK (1,392), kekayaan daerah (3,891), dan *tax effort* (1,522) memiliki nilai VIF. Dapat disimpulkan dari uji multikolinieritas bahwa uji asumsi konvensional tidak menunjukkan gejala multikolinieritas apa pun.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson (DW)
1	.619	.37946	1.782

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

Tabel 8 menunjukkan bahwa model regresi menghasilkan nilai DW sebesar 1,914. Tabel DW menunjukkan bahwa total data (n) = 50 dan k = 4 (k ialah total variabel bebas), skor DU adalah 1,7214, sedang skor 4-DU adalah 2,278. Signifikansinya adalah 0,05. Angka-angka ini menunjukkan bahwa skor DW ada pada DU <DW <4-DU, atau 1,7214 <1,782 <2,6221. Bisa ditarik simpulan bahwasanya tak terdapat autokorelasi berdasar temuan pengujian.

3.3. Uji Hipotesis

3.3.1 Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b		
Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619	.37946

a. Predictors: (Constant), Tax Effort, DAK, PAD, Kekayaan Daerah
 b. Dependent Variable: Belanja Modal
 Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

Tabel 9 menunjukkan bahwasanya skor *Ajusted R Square* sejumlah 0.619. Skor ini bermakna variabel PAD, DAK, kekayaan daerah dan *tax effort* mempengaruhi variabel belanja modal sejumlah 61,9% selebihnya 38,1% dipengaruhi variabel lainnya yang tak diobservasi pada riset ini.

3.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	5.999	1.312
	PAD	.356	.078
	DAK	.037	.006
	Kekayaan Daerah	.336	.076
	Tax Effort	.003	.001

a. Dependent Variable: Belanja Modal
 Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

Berdasar tabel 10, nilai konstantanya adalah sebesar 5,999, sedangkan nilai koefisien regresi PAD (X₁) yaitu 0,356, DAK (X₂) yaitu 0,037, kekayaan daerah (X₃) yaitu 0,336 dan *tax effort* (X₄) sejumlah 0,003. Adapun model regresi linier berganda yang tercipta ialah:

$$Y = 5,999 + 0,356 X_1 + 0,037 X_2 + 0,336 X_3 + 0,003X_4 + \epsilon$$

Variabel PAD memiliki koefisien regresi sejumlah 0,356, memberikan nilai positif (+), yang memperlihatkan bahwasanya ada hubungan antara variabel PAD dan belanja modal. Perihal tersebut bermakna bahwasanya kenaikan PAD sejumlah 1% mengakibatkan belanja modal meningkat sejumlah 35,6%. Meskipun demikian, penurunan PAD sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sebesar 35,6%. Koefisien regresi variabel DAK adalah 0,037, yang menunjukkan hasil positif (+). Ini menunjukkan bahwa variabel DAK dan belanja modal saling terkait, artinya kenaikan DAK sejumlah 1% akan mengakibatkan belanja modal meningkat sejumlah 0,37%. Di sisi lain, penurunan DAK sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,37%.

Koefisien regresi variabel kekayaan daerah adalah 0,336, yang menunjukkan nilai positif (+), yang memperlihatkan ada hubungan antara kedua variabel itu. Perihal tersebut bermakna bahwasanya untuk setiap kenaikan kekayaan daerah sejumlah 1%, akan menjadikan belanja modal meningkat sejumlah 33,6%.. Namun apabila kekayaan daerah turun sebesar 1% maka dapat diprediksikan mengalami penurunan sebesar 33,6%.

Koefisien regresi variabel *tax effort* sebesar 0,003 dengan menunjukkan nilai positif (+) yang artinya bahwa adanya hubungan variabel *tax effort* dengan variabel belanja modal, yang bermakna manakala *tax effort* naik sejumlah 1% menjadikan tingkat belanja modal akan meningkat sejumlah 0,03%. Namun apabila *tax effort* turun sebesar 1% maka dapat diprediksikan mengalami penurunan sebesar 0,03%.

3.3.3 Uji Statistik t (parsial)

Tabel 11 menyajikan hasil uji parsial untuk masing-masing variabel. Skor t-hitung serta t-tabel variabel PAD adalah t-hitung (4,593) > t-tabel (2,01410), dengan tingkat probabilitas sig. (0,000) < α (0,05). Hasil tersebut

Tabel 11. Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.572	.000
	PAD	4.593	.000
	DAK	6.101	.000
	Kekayaan Daerah	4.396	.000
	Tax Effort	2.217	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

memperlihatkan bahwasanya variabel PAD memengaruhi variabel belanja modal secara positif dan signifikan.

Berdasarkan skor t-hitung serta t-tabel variabel DAK, yakni t-hitung (6,101) > t-tabel (2,01410) serta tingkat probabilitas sig. (0,000) < α (0,05), bisa dikatakan bahwasanya variabel DAK memengaruhi variabel belanja modal secara positif dan signifikan.

Berdasarkan nilai t-hitung serta t-tabel variabel kekayaan daerah, yakni t-hitung (4,396) > t-tabel (2,01410) serta tingkat probabilitas sig. (0,000) < α (0,05), bisa ditarik simpulan bahwasanya secara parsial variabel kekayaan daerah memengaruhi positif signifikan variabel belanja modal.

Dengan tingkat probabilitas sig. (0,032) < α (0,05) serta skor t-hitung dan t-tabel variabel *tax effort* sejumlah t-hitung (2,217) > t-tabel (2,01410), dapat disimpulkan bahwa variabel *tax effort* memengaruhi variabel belanja modal secara positif signifikan.

3.3.4 Uji Statistik F (simultan)

Tabel 12. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	89.386	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Tax Effort, PAD, DAK, Kekayaan Daerah

Sumber : Hasil Output SPSS 26, 2024

Untuk menguji F-tabel dalam uji hipotesis, berdasarkan hasil pengujian f-statistik dalam Tabel 12, maka harus diketahui derajat kebebasan (df). Karena n ialah total data sedang k ialah total variabel independen, dapat diturunkan F-tabel sejumlah 2,58 dengan Df1 (total variabel - 1) sedang Df2 (n-k-1) = k = 4 ataupun 50-4-1 = 45. Riset ini hasilnya memperlihatkan bahwasanya PAD, DAK, kekayaan daerah, dan upaya perpajakan secara bersamaan mempunyai pengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Skor F-hitung sejumlah 89,386 dengan skor signifikansinya 0,000 memperlihatkan bahwasanya taraf signifikansinya < 5% ($\alpha = 0,05$). Skor F-hitung sejumlah 89,386 juga melebihi F-tabel sejumlah 2,58, sehingga mendukung kesimpulan.

Variabel PAD (X1) mempunyai skor koefisien regresi positif sejumlah 0,356 berdasar hasil pengujian t. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya belanja modal akan naik sejumlah 35,6% untuk setiap kenaikan PAD sejumlah 1%. Meskipun demikian, penurunan PAD sejumlah 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sejumlah 35,6%. Berdasarkan skor signifikansinya sejumlah 0,000 < 0,05 untuk variabel PAD yang menunjukkan bahwasanya variabel ini memengaruhi signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (belanja modal), perhitungan statistik yang dilakukan pada saat pengolahan data penelitian ini menghasilkan skor t hitung sejumlah 4,593 sedang t tabel sejumlah 2,01410 pada α (0,05). Dengan demikian hipotesis yang diambil adalah Ho: memperoleh penolakan sedang H1: memperoleh penerimaan. Perihal tersebut mendukung bahwasanya PAD (X1) secara positif cukup besar memengaruhi belanja modal (Y) pada Pemerintah Provinsi Sumatera.

Meningkatkan PAD adalah langkah penting untuk mendukung belanja modal, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan yaitu dengan cara optimalisasi pemungutan pajak, pengelolaan retribusi daerah, meningkatkan efisiensi badan usaha milik daerah (BUMD), pemanfaatan serta optimalisasi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan lain hal sebagainya. Salah satu ukuran kemandirian daerah adalah besarnya PAD, karena cukupnya serta sesuainya PAD akan mengurangi taraf ketergantungan daerah terhadap TKD pemerintah pusat yang antara lain digunakan untuk membiayai pengeluarannya modal (Zulkarnain & Haryati, 2023). Temuan riset ini senada dengan riset yang dijalankan Zulkarnain & Haryati (2023), Marseno & Mulyani (2020), Salsabila dan Rahayu (2021) yang memperlihatkan bahwasanya PAD memengaruhi belanja modal.

Variabel DAK (X2) mempunyai skor koefisien regresi positif sejumlah 0,037 berdasar hasil uji t. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya belanja modal akan meningkat sejumlah 0,37% untuk setiap kenaikan DAK sebesar 1%. Sebaliknya, penurunan DAK sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,37%. Berdasarkan analisis data penelitian, perhitungan statistik menghasilkan skor t hitung sejumlah 6,101 sedang t tabel sejumlah 2,01410 pada α (0,05). Karenanya, skor t hitung lebih besar daripada skor t tabel. Di lain sisi, skor signifikansi variabel DAK sejumlah 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwasanya variabel ini mempunyai pengaruh signifikan sebagian terhadap variabel terikat, yaitu belanja modal. Dengan demikian, hipotesis diterima (H2) dan ditolak (Ho). Hal

ini mendukung anggapan bahwa DAK (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y) di Pemerintah Provinsi Sumatera.

Kemampuan sumber daya manusianya harus pemerintah daerah di Sumatera tingkatkan untuk mengelola keuangan dan melaksanakan proyek. Pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai di bidang perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan proyek sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK dalam pelaksanaan belanja modal. Penggunaan DAK harus dibatasi pada operasi investasi, seperti membangun, membeli, merenovasi, dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas fisik dengan masa manfaat yang panjang, termasuk membeli fasilitas fisik tambahan.

Penyaluran DAK diantisipasi akan berdampak pada anggaran belanja modal karena DAK sering kali mengakibatkan peningkatan aset tetap milik pemerintah yang dipakai guna meningkatkan layanan publik. Temuan penelitian ini mendukung penelitian Waskito dkk. (2019), Anny Widiasmara (2019), dan Pramudya dan Abdullah (2020) yang menunjukkan dampak DAK terhadap belanja modal.

Variabel kekayaan daerah (X3) mempunyai skor koefisien regresi positif sejumlah 0,336% berdasar hasil pengujian t parsial. Perihal tersebut menunjukkan bahwasanya belanja modal akan naik sejumlah 33,6% untuk setiap pertumbuhan kekayaan daerah sejumlah 1%. Sebaliknya, penurunan kekayaan daerah sejumlah 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sejumlah 33,6%. Perhitungan statistik yang dilakukan pada tahap pengolahan data menghasilkan nilai t hitung sebesar 4,396, sedang t tabel sejumlah 2,01410 pada α (0,05). Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya skor t hitung lebih besar daripada t tabel. Selanjutnya, skor signifikansi variabel kekayaan daerah sejumlah $0,000 < 0,05$ memperlihatkan bahwasanya variabel tersebut secara parsial memengaruhi variabel dependen, belanja modal, artinya hipotesis ditolak (H3) dan diterima (H1). Hal ini mendukung anggapan bahwa kekayaan daerah (X3) mempunyai pengaruh positif cukup besar terhadap belanja modal (Y) di Pemerintahan Provinsi Sumatera.

Pemerintah daerah di Sumatera diharapkan dapat memanfaatkan kekayaan daerah yang ada dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan belanja modal. Masyarakat akan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah apabila belanja modal terpenuhi. Kepuasan ini akan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk membayar pajak, hingga akhirnya menjadikan pendapatan dan kesejahteraan daerah mengalami peningkatan, khususnya di provinsi Sumatera. Riset ini hasilnya selaras dengan riset yang dijalankan Sanjaya & Helmy (2021), Anny Widiasmara (2019), Novianti dan Khairudin (2023) bahwa

kekayaan daerah secara positif memengaruhi belanja modal.

Uji t parsial hasilnya menunjukkan bahwa skor koefisien regresi variabel *tax effort* (X4) bertanda positif, yaitu sejumlah 0,003. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya belanja modal akan meningkat sejumlah 0,03% untuk setiap kenaikan *tax effort* sejumlah 1%. Meskipun demikian, penurunan *tax effort* sejumlah 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan sejumlah 0,03%. Setelah menganalisis data penelitian, perhitungan statistik menghasilkan skor t hitung sejumlah 2,217, meskipun t tabel berada pada angka 2,01410 pada α (0,05). Akibatnya, skor t hitung lebih besar daripada t tabel. Lebih lanjut, skor signifikansi variabel *tax effort* sejumlah $0,032 < 0,05$ memperlihatkan bahwasanya variabel ini memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependennya, belanja modal, sehingga mendukung penolakan hipotesis dan penerimaan H4. Hal ini mendukung anggapan bahwa *tax effort* (X4) mempunyai pengaruh positif cukup besar terhadap belanja modal (Y) di Pemerintahan Provinsi Sumatera.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax effort* yang merupakan ukuran sejauh mana pemerintah mampu mengumpulkan pendapatan dari pajak berdasarkan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya oleh karenanya pemerintah daerah diharapkan untuk mengelola dan memanfaatkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat secara efisien. Ketika pemerintah berhasil dalam meningkatkan *tax effort*, masyarakat dapat memperoleh lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek Dana ini digunakan untuk layanan publik yang terkait langsung dengan investasi modal, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Temuan riset ini konsisten dengan riset yang dijalankan Nugroho & Wana (2021), Shella Agustin 2020 (2021) bahwa *tax effort* secara positif signifikan memengaruhi belanja modal.

Variabel kekayaan daerah, upaya perpajakan, DAK, dan PAD memiliki nilai t-hitung sebesar 89,386 menurut hasil uji simultan, atau uji f. Skor f-hitung lebih besar daripada f-tabel, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai f-tabel sebesar 2,79. Karenanya, bisa ditarik simpulan bahwasanya variabel dependen belanja modal secara bersamaan dipengaruhi oleh faktor PAD, DAK, kekayaan daerah, dan *tax effort*. Bisa ditarik simpulan bahwasanya keseluruhan PAD, DAK, kekayaan daerah, serta *tax effort* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal karena ambang signifikansi 0,000 kurang daripada 0,05 ataupun 5%. Perihal tersebut membenarkan diterimanya hipotesis penelitian (H5) tentang bagaimana kekayaan daerah, *tax effort*, PAD, dan DAK mempengaruhi belanja modal.

Studi ini memberikan bukti empiris yang mendukung dampak simultan dan sangat signifikan dari PAD, DAK, kekayaan daerah, dan *tax effort* terhadap belanja

modal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai r-kuadrat yang disesuaikan. Nilai koefisien determinasi, atau r-kuadrat yang dimodifikasi, adalah 0,619, ataupun 61,9%. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya kekayaan daerah, upaya perpajakan, DAK, dan PAD semuanya memiliki dampak simultan sebesar 61,9% terhadap belanja modal, sehingga menjadikannya sangat penting.

4. Kesimpulan

Berdasarkan fakta beserta pembahasan tersebut, bisa ditarik simpulan bahwasanya PAD, DAK, kekayaan daerah, dan *tax effort* semuanya berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal. Skor Adjusted R Square sejumlah 0,619. Angka tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel belanja modal dipengaruhi variabel PAD, DAK, kekayaan daerah, dan *tax effort* sebesar 61,9%; variabel tambahan yang tidak tercakup dalam penelitian ini memengaruhi sisanya sebesar 38,1%.

Kesimpulan riset ini diharap mampu memberi pengetahuan serta pemahaman, khususnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan PAD, DAK, Kekayaan Daerah, dan *tax effort* yang semuanya akan berdampak pada peningkatan dan penyerapan belanja modal. Sebaiknya peneliti selanjutnya memasukkan faktor-faktor independen yang tak termasuk dalam riset ini, semisal rasio keuangan, DAU, DBH, Silpa, serta variabel independen lainnya yang diperkirakan berdampak pada belanja modal. Sepuluh provinsi di Sumatera menjadi sasaran penelitian; Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian ini agar mencakup objek penelitian lain, seperti kabupaten atau kota, atau seluruh provinsi di Indonesia.

Daftar Rujukan

- Budiriananti, N., Kurniawan, S., & Mulyati, D. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Sangga Buana*, 12(1), 1–14.
- Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143–155.
- Hamid, A., & Yusuf, M. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–12.
- Jansen, M. A., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, market structure and organizational structure. *Journal of Law and Economics*, 19(1), 301–350.
- Lamido, A. A., Sa'diyah, N., & Idris, I. (2018). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 121–130.
- Lutpikah, N. W., Mahendra, D., Daerah, P. P. A., Umum, D. A., & Dana Bagi Hasil, D. A. K. (2020). Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 147–158.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Maulana, I. A., Rohman, A., & Muhaemin, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(1), 1–14.
- Nugroho, Y. A., & Wana, D. (2021). Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Upaya Pemungutan Pajak (Tax Effort) Provinsi Di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi-[SNAV]*, 9(1), 224–232.
- Pramudya, A., & Abdullah, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Sangga Buana*, 11(2), 117–130.
- Putri, R. A., & Sari, I. N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Sangga Buana*, 11(2), 131–144.
- Raharja, I. G. N., Sudiarmika, I. W., & Ariana, I. G. A. D. (2017). Pengaruh Manajemen Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Optimalisasi Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 1–14.

- Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Petumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 450–469.
- Simanjuntak, C. P., & Ginting, S. M. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Sangga Buana*, 10(2), 117–130.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R & D* (K. R. . D. E. Kedua (ed.)). Alfabeta.
- Waskito, dkk2019 P. P. E., Daerah, P. A., & Umum, D. A. (2019). *Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*. Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variabel Moderating Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45–56.
- Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 27–37.